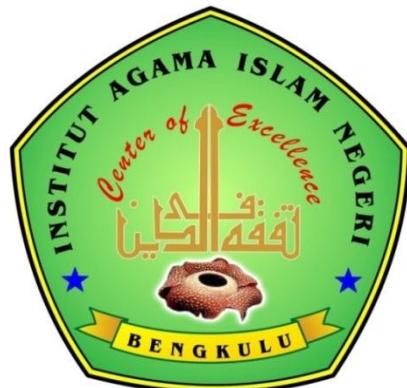


**PENDATAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN  
(RASKIN) DI KELURAHAN LUBUK LINTANG KECAMATAN SELUMA  
DALAM PERESPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**Sisono Kosodo**  
**NIM 2123619601**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M / 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

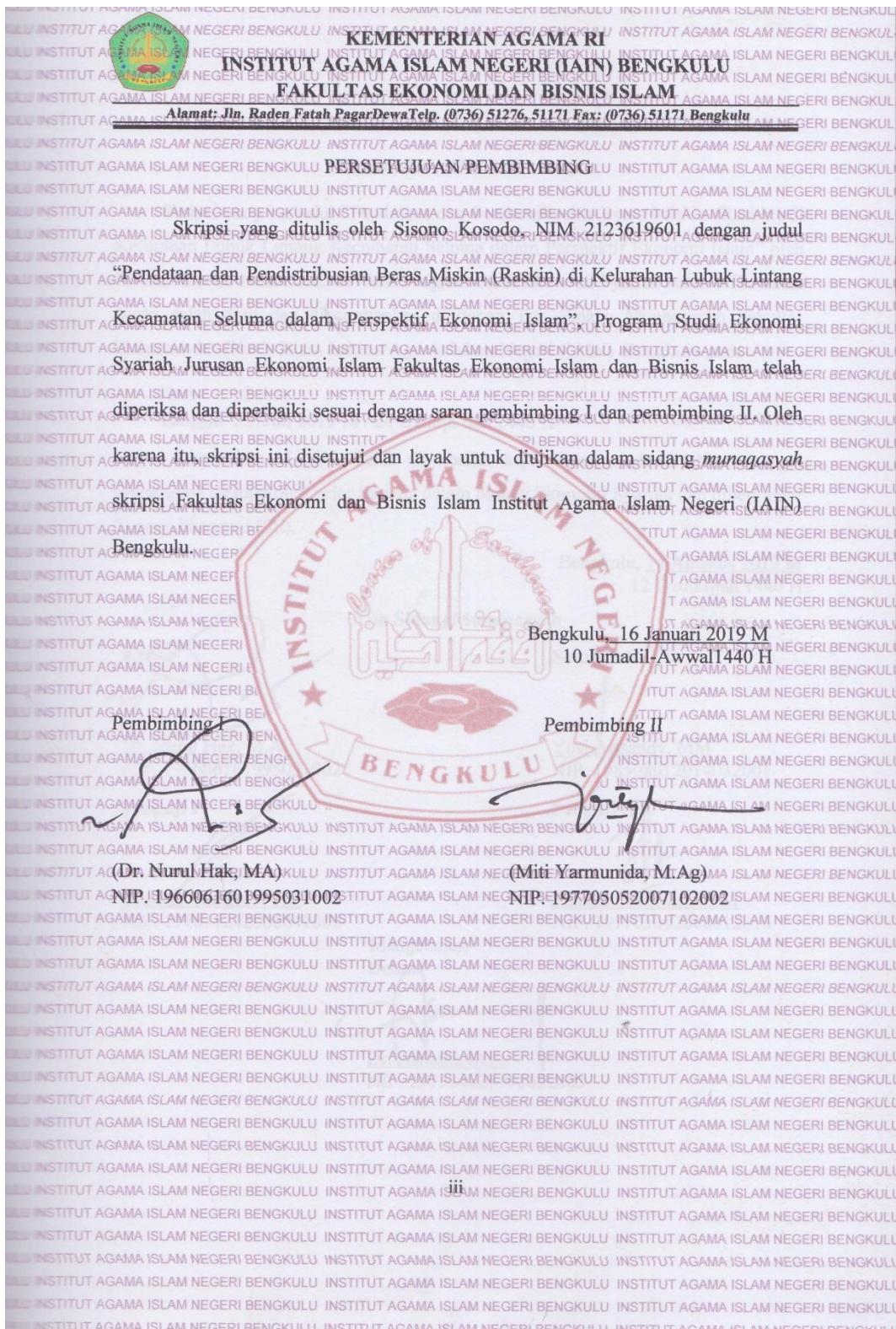
Dengan ini saya menyatakan :

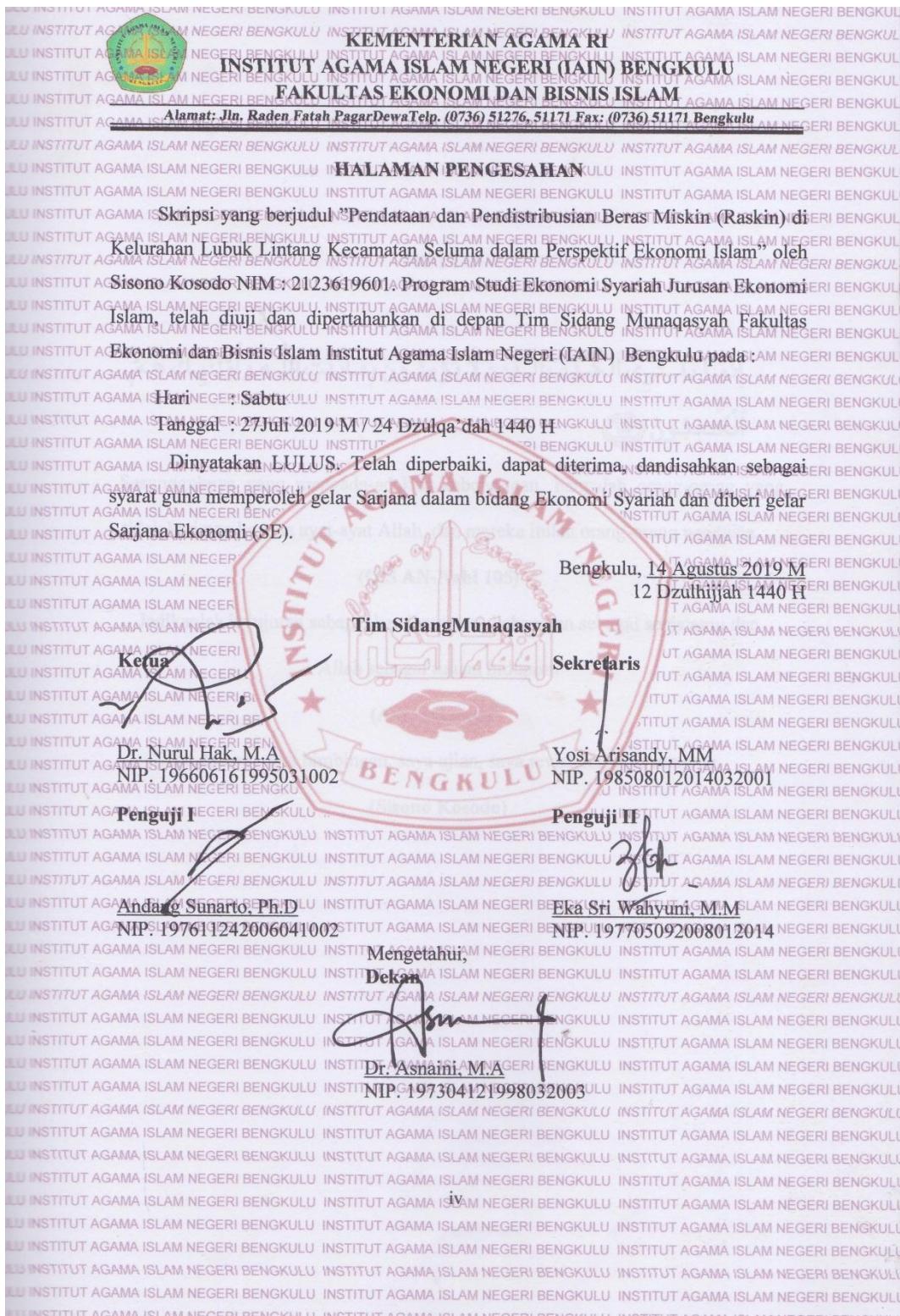
1. Skripsi dengan judul “Pendatang dan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma dalam Perspektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 14 Agustus 2019  
12 Dzulhijjah 1440

Mahasiswa yang menyatakan







إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعِلْمِنَا اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْكَذِبُونَ ١٠٥

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.

(Q.S AN-Nahl 105)

Jadikanlah kejujuran sebagai kendaraanmu, kebenaran sebagai senjatamu dan

Allah sebagai tujuan hidupmu

(Abu Sulaiman)

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang.

(Sisono Kosodo)

## **PERSEMBAHAN**

Segenab ketulusan dan do'a skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang sangat aku sayangi dan aku cintai:

1. Ayahku madnurdin (Alm) tercinta dan ibuku herawani yang selalu memberikan do'a, motivasi bimbingan dan kesabaran yang luar biasa untukku.
2. Untuk kakak Erlan Gustian dan Toton Hairi tersayang yang selalu memberi semangat serta saran untuk masa depanku.
3. Untuk adikku Yuni Lestari Putri tersayang yang selalu memberi dukungan masukan dan motivasi.
4. Untuk para sahabatku yang membantu memberi masukan untuk skripsiku.
5. Pembimbing I Drs. Nurul Hak, MA yang telah membimbingku selama pembuatan skripsiku.
6. Pembimbing II Miti Yarmunida, M.Ag yang telah memberi motivasi dan masukan untuk kebaikan skripsiku.
7. Teman-teman Ekis dan Mery yang selalu mendukung dan memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.

## **ABSTRAK**

Pendataan dan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin)

Di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma

oleh Sisono Kosodo, NIM 212 361 9601.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendataan beras miskin (Raskin) dan pendistribusian di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma dan menganalisis dengan perspektif ekonomi Islam terhadap pendataan beras miskin (Raskin) dan pendistribusian. Untuk mengungkap permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Dalam penelitian ini diambil informan, yaitu Lurah, ketua RT dan masyarakat. Hasil penelitian sistem pendataan dan pendistribusian beras miskin di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma dalam melakukan pendataan dan pendistribusian yaitu masih menggunakan pendataan manual dengan cara petugas raskin mendatangi rumah warga yang layak mendapatkan bantuan beras miskin dan ada juga warga yang diminta untuk mengumpulkan berkas ke ketua RT dan ke kantor Lurah serta menurut perspektif ekonomi Islam belum sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena petugas raskin belum amanah.

Kata kunci: Pendataan, Pendistribusian, Beras Miskin.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala Nikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendataan Dan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

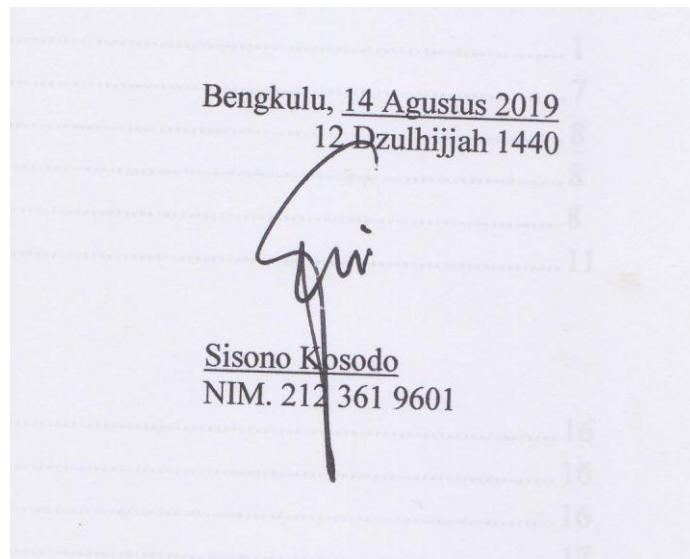
Shalawat serta salam untuk kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam dan tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga ummat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang di Ridhoi Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam (Ekis) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, berperan selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, berperan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu.
3. Eka Sri Wahyuni, SE, MM, berperan selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Drs. Nurul Hak, MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan doa.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
7. Ayuk, Kakak dan keponakan serta semua saudaraku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu ada menemaniku, menghiburku dan selalu mendo'akan kelancaran studyku.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbingku selama ini dengan penuh kesabaran. dan keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
10. Teman seperjuanganku Ekis yang selalu setia memberi semangat dan motivasi. Terima kasih teman.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pendataan .....	16
1. Pengertian Pendataan .....	16
2. Pendataan Data.....	16
B. Pendistribusian .....	17
1. Pengertian Pendistribusian .....	17
2. Nilai-Nilai Distribusi.....	18

3. Sektor-Sektor Distribusi Pendapatan .....	19
4. Distribusi dalam Islam .....	22
C. Beras Miskin .....	36
1. Mekanisme Bantuan Raskin.....	39
2. Tujuan Bantuan Raskin .....	40
D. Ekonomi Islam .....	41
1. Pengertian Ekonomi Islam .....	41
2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam .....	42
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	45

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	50
B. Pendataan Wilayah.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DANN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	69
1. Sistem Pelaksanaan Pendataan Beras Miskin (Raskin) dan Pendistribusian dianalisis Menggunakan Teori Kriteria Program Raskin.....	69
2. Pendataan dan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma Menurut Prespektif Ekonomi Islam .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA .....78**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap negara pasti melaksanakan pembangunan untuk negaranya. Pembangunan merupakan hal yang mendasar yang dilakukan setiap negara untuk mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya. Pada hakikatnya negara melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan bangsanya secara utuh dan menyeluruh tanpa membedakan suku, agama dan jenis kelamin. Dalam undang-undang dasar 1945, pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karenanya sering kali terdengar istilah pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>1</sup>

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki beragam suku, budaya dan ciri khas, karenanya dalam melakukan pembangunan tentulah tidak berjalan di jalan yang mulus. Indonesia juga banyak menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam proses pembangunan, salah satu masalah utama yang dihadapi indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan.<sup>2</sup> Tingkat kemiskinan yang tinggi sangat mempengaruhi proses pembangunan. Kemiskinan menunjukkan dan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Karenanya berbagai kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan yang inklusif terus dilakukan oleh pemerintah agar

---

<sup>1</sup> Juknis, Julkas, *Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.67.

<sup>2</sup> Badan Urusan Logistik, *Perkembangan Realisasi Beras Miskin*, (Jakarta:Bumi Aksara,2012), h.98.

jurang antara si kaya dan si miskin tidak terlalu lebar, artinya jarak antara orang yang mampu dan yang tidak mampu agar tidak terlalu jauh. Meskipun telah demikian kemiskinan terus menjadi masalah yang mempengaruhi kebutuhan seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan berbagai hal, baik rendahnya tingkat pengetahuan maupun tidak adanya akses terhadap pekerjaan yang menyebabkan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup.<sup>3</sup>

Dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, konsep kebijakan pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan ke berbagai instrumen program dan proyek. Pada pengentasan kemiskinan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar tingkat kemiskinan dapat menurun. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk kebijakan dan produk hukum yang diturunkan dalam bentuk program-program pengembangan ekonomi lokal.<sup>4</sup>

Salah satu program nasional dalam program bantuan sosial langsung kepada masyarakat adalah pemberian beras untuk warga miskin (Raskin) untuk masyarakat miskin. Kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga negara. Raskin adalah supsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan

---

<sup>3</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.31.

<sup>4</sup> Juknis, Julkas, *Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.70.

rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.<sup>5</sup>

Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (raskin) ini sudah dimulai sejak 1998. Raskin moneter 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Dengan adannya raskin dapat menjadi program yang lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin. Setiap tahunnya rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS atau PM), raskin berhak menebus beras raskin sebanyak 15 kg per RTS atau PM per bulan. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh masyarakat sebanyak Rp. 1.600/kg pada tempat distribusi langsung pada masyarakat. Dengan pelaksanaan seperti ini diharapkan masyarakat miskin dan retan miskin akan mendapat cukup pangan dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.<sup>6</sup>

Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indikator keberhasilan dan pelaksanaannya. Pada program raskin, keberhasilan pelaksanaannya diukur tepat jumlah beras yang diberikan kepada masyarakat tidak dikurangi atau dilebihkan, tepat harga artinya harga yang diberikan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tepat waktu datangnya beras dan pembagian atau pengambilan tepat pada waktu yang telah terjadwal, tepat kualitas beras yang diberikan adalah beras yang berkualitas bukan beras yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan tepat administrasi

---

<sup>5</sup> Bulog, *Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perum Bulog Tahun*, (Perum Bulog. Jakarta 2014) h.133.

<sup>6</sup> Badan Urusan Logistik, *Perkembangan Realisasi Beras Miskin*, (Jakarta:Bumi Aksara,2012), h.99.

artinya pemerintah harus tepat dalam melakukan pemilihan bagi masyarakat yang memang benar-benar harus diberikan bantuan raski.<sup>7</sup>

Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan diterjemahkan dalam bahasa arab yaitu *faqru* yang menurut bahasa memiliki makna membutuhkan (*ihtiyaj*) dan orang yang membutuhkan disebut *faqir*. Sedangkan dalam istilah *faqir syara*, bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya sehingga tidak bisa dimintai apa-apa.<sup>8</sup>

Dalam Islam kemiskinan bisa mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah serta timbulnya kejahanatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga dan dapat merusak akhlak. Karena itu untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni fakir miskin sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qura'an Surah Al-Baqarah ayat 177 yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.67.

<sup>8</sup> Yusuf, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya, Bina Islam, 2015), h.30.

<sup>9</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 129.

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْتُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ  
 وَالنَّبِيِّينَ وَعَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْفُرْقَانِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ  
 وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّاَلِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَانَى الْزَّكُوْةَ  
 وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبُلْسَاءِ وَالضَّرَاءِ  
 وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

*Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Kota Bengkulu program pemberian raskin pada masyarakat miskin juga dilaksanakan di Kec. Seluma Kel. Lubuk Lintang. Kelurahan lubuk litang terletak di Kabupaten Seluma dengan fotografi wilayah berbukit-bukit dengan jenis tanah warna merah lempungan berpasir. Luas wilayah ini 365 Ha yang mempunyai irigasi teknis tetapi tidak mempunyai lahan sawah, hanya tersedia lahan kering yang digunakan sebagai lahan pemukiman. Sehingga di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma merupakan kawasan atau pemukiman yang banyak ditemui angka kemiskinan. Sehingga program yang diberikan pemerintah untuk rakyat miskin berupa raskin juga diberikan bagi masyarakat

Kelurahan Lubuk Lintang guna untuk membantu dan meringankan beban mereka.<sup>10</sup>

Kelurahan Lubuk Lintang dalam menjalankan program raskin terhadap warganya sudah berjalan, menurut lurah bapak Surhani<sup>11</sup> mengungkapkan bahwa bantuan raskin untuk warga miskin sudah didata dan didistribusikan dengan sangat baik dan adil. Artinya petugas yang bersangkutan untuk mendata dan mendistribusikan kepada warga telah mereka jalankan dengan amanah dan raskin diberikan kepada yang berhak menerima. Hal lain juga disampaikan oleh ketua RT Kelurahan Lubuk Lintang bapak Usman<sup>12</sup> bahwa pembagian raskin itu diutamakan bagi warga yang tidak mampu jadi tidak semua warga menerima bagian raskin tersebut sehingga petugas yang mendata dan mendistribusikan raskin sudah bekerja dengan baik.

Namun berdasarkan surve lapangan yang peneliti lakukan kepada warga Desa Lubuk Lintang masih banyak warga yang belum menerima raskin, lantaran nama mereka tidak tercantum atau terdaftar dalam pemilihan warga miskin yang berhak menerima raskin, padahal mereka adalah salah satu warga yang tidak mampu karena uuntuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka sangat sulit, lantaran pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan

---

<sup>10</sup> Wawancara RT, 24 November 2016.

<sup>11</sup> Wawancara Surhani, 24 November 2016.

<sup>12</sup> Wawancara RT, 24 November 2016.

yang baik. Seperti yang disampaikan oleh bapak Rokit<sup>13</sup> salah satu warga yang tidak menerima beras raskin.<sup>14</sup>

Sehingga program raskin di Kelurahan Lubuk Lintang belum sesuai harapan kerena masih banyak beras raskin yang dibagikan secara tidak adil atau merata, baik masyarakat kaya ataupun miskin tetapi kebanyaan warga miskin tidak menerima raskin. Dan pada saat peneliti melakukan observasi awal kelapangan terdapat beberapa masyarakat miskin tidak mendapat bagian dari raskin, jika dilihat dari tujuan adanya raskin adalah hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu.<sup>15</sup> Namun dalam hal ini di Kelurahan Lubuk Lintang berbanding tebalik dengan tujuan adanya raskin. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul, “**Pendataan dan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendataan beras miskin (Raskin) dan pendistribusian di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pendataan beras miskin (Raskin) dan pendistribusian di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma?

---

<sup>13</sup> Wawancara Rokit, 24 November 2016.

<sup>14</sup> Wawancara RT, 24 November 2016.

<sup>15</sup> Pedoman Umum, *Raskin*, (Jakarta:Mekanisme Pelaksanaan, 2018), h.23.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendataan beras miskin (Raskin) dan pendistribusian di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang pendataan beras miskin (Raskin) dan pendistribusian di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam terutama yang membahas tentang pendataan dan pendistribusian beras miskin (raskin) menurut perspektif ekonomi Islam dan disiplin ilmu lainnya. Serta dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam keilmuan khususnya mengenai penyesuaian materi yang ingin disampaikan, sehingga dapat memberikan tambahan *literature*.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Agar penelitian tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan berupa kajian terhadap penelitian terdahulu. Di antaranya ditulis oleh Nina

Maryana<sup>16</sup> tahun 2010 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Semarang dengan judul penelitian “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang”.

Masalah penelitiannya adalah bagaimana Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, serta apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi program raskin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program raskin dan apa yang menjadi pendukung serta penghambat program raskin.

Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu kualitatif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah implementasi beras miskin belum berjalan dengan baik seperti yang dijalankan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan raskin 5T belum sepenuhnya tercapai. Serta aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi berdasarkan model implementasi Edward III terdapat aspek yang berjalan baik dan belum baik. Pada aspek komunikasi, konsistensi, dan kejelasan informasi sudah sesuai SOP dan poin transmisi pesan belum sepenuhnya sampai kedaerah.

---

<sup>16</sup> Nina Maryana, *Implemitasi Porgram Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang*,(Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Semarang, 2010).

Penelitian yang ditulis oleh Winria Pitapurwati<sup>17</sup> tahun 2014 di Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Makna Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat di Kec. Sumarorong”. Masalah penelitiannya adalah bagaimana Makna Beras Miskin Bagi Masyarakat di Kec. Sumarorong. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna beras miskin di Kec. Sumarorong.

Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah kualitatif descriptif dengan program raskin sebagai unit analisis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah bahwa makna beras miskin (Raskin) di kec. Sumarorong sangat banyak manfaat dalam membantu kesulitan bagi warga miskin dan dapat mensejahterakan rakyat miskin.

Penelitian yang di lakukan oleh Misra Yetti<sup>18</sup> tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Kajian Geografis Beras Miskin (Raskin) di Kel. Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Masalah penelitiannya adalah bagaimana kajian geografis beras miskin menurut perspektif ekonomi Islam di kel. teluk merbau menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kajian geografis raskin di kel. teluk merbau menurut perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa

---

<sup>17</sup> Winria Pitapurwati, *Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kec. Sumarorong*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin.2014).

<sup>18</sup> Misra Yetti, *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kel. Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.2011).

Kajian geografis raskin ditinjau dari persektif ekonomi Islam karenas banyaknya masyarakat yang tidak mampu dalam perekonomian sehingga mereka mengalami kekeurangan gizi, sehingga pemerintah memberikan bantuan melalui raski, dan jika dilihat dari kacamata Islam bahwa Islam menganjurkan sesama manusia saling tolong menolong.

Dari pemaparan di atas ada hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas beras miskin (raskin), sehingga karya-karya tersebut penulis jadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi penulis, namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dimana penelitian yang dilakukan oleh Nina Maryana yaitu, Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Winria Pitapurwati Makna Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat di Kec. Sumarorong. Misra Yetti Kajian Geografis Beras Miskin (Raskin) di Kel. Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang, Pendataan dan Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) Di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian

mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2018 Juli 2019.

Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian dan hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma.

Pengambilan lokasi ini, karena berdasarkan pengamatan peneliti:

- a. Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma merupakan salah satu tempat yang tercatat tinggi tingkat kemiskinannya.
- b. Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma memiliki permasalahan yang menarik untuk diteliti oleh peneliti yaitu pendataan dan pendistribusian beras miskin.
- c. Informan bersikap terbuka dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti secara jujur.

## **3. Informan Penelitian**

Informan diambil dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang menjadi informan penelitian adalah:

- a. Informan masyarakat berjumlah 11 warga yang sudah lama tinggal di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma.
- b. Lurah yang menjabat di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma.
- c. Ketua RT 1 sampai Ketua RT 5 yang masih menjabat.
- d. Informan mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan penelitian.

- e. Masyarakat yang diwawancara adalah warga yang benar-benar tidak mampu dan mendapat bantuan beras miskin dari pemerintah.
- f. Bersedia untuk di wawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau penelitian berlangsung.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Sumber Data

Berdasarkan sumber datanya maka peneliti mengambil.

###### 1) Data Primer

Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh secara langsung dari kepala Desa, RT, petugas raskin dan warga. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana pendataan dan pendistribusian beras miskin. Untuk mendapatkan dan memperoleh data yang akurat, penulis mendatangi perindividu dan tidak jarang ikut serta melihat dalam kegiatan mereka.

###### 2) Data Sekunder

Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi, foto, dan laporan-laporan yang tersedia. Data sekunder yang diambil oleh peneliti yaitu foto-foto, rekaman suara sekaligus vidio, sejarah dan profil di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma.

##### b. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

### 1) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Seperti peneliti datang kelokasi penelitian untuk memastikan apakah permasalahan benar-benar ada dilapangan. Observasi yaitu peneliti melihat langsung terhadap objek seperti peneliti melihat langsung pendataan dan pendistribusian raskin dilapangan.

### 2) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun model wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian adalah dengan teknik wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur ini seorang peneliti hanya menanyakan atau mewawancarai responden sesuai dengan pedoman wawancara yang ada atau yang telah disiapkan oleh peneliti.<sup>19</sup>

### 3) Dokumentasi

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk melengkapi observasi dan wawancara<sup>20</sup>. Dokumentasi dalam penelitian ditujukan untuk

---

<sup>19</sup>Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial* (Kualitatif dan Kuantitatif) (Jakarta: Group Pers), h. 218.

<sup>20</sup>Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial* (kualitatif dan kuantitatif, 2008) (Jakarta: Group Pers), h. 218.

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dan data yang relevan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan apabila semua data peneliti telah terkumpul. Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif normatif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta serta hibungan antara satu fenomena dengan fenomena-fenomena tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data yaitu peneliti melakukan observasi kelapangan dengan mencari tau permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, setelah itu peneliti melakukan penyajian data yang dibuat dalam bentuk proposal hingga skripsi dan setelah itu peneliti melakukan pengambilan kesimpulan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendataan**

##### **1. Pengertian Pendataan**

Secara umum menurut biro pusat statistik pengertian pendataan adalah proses pembuktian yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis pengertian pendataan adalah proses yang lebih berkaitan dengan pengumpulannya secara empiris. Pendataan menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) terdapat 2 pengertian. Pengertian yang pertama pendataan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mendata. Pengertian yang kedua pendataan berarti pengumpulan data. Pendataan warga miskin yang dimaksud pada penelitian ini adalah pengumpulan data siswa yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memahami identitas dan kondisi lingkungan masyarakat.

##### **2. Pendataan Data**

Beberapa sumber pendataan yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Sensus atau cacah jiwa adalah proses pencatatan, perhitungan dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua masyarakat yang benar-benar tercatat bertempat tinggal disuatu wilayah, umumnya sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP).

---

<sup>21</sup> Suryadi, *Sistem Basis Data*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2014), h. 45-49.

- b. Surve dilihat dari hasil pelaksanaannya surve hampir sama prosesnya dengan sensus hanya yang membedakan adalah pada waktu pelaksanaannya, wilayah dan jumlah penduduk yang didata. Proses pendataan surve hanya dilakukan terhadap sempel. Pelaksanaannya dapat dilakukan kapanpun dan tidak memiliki periodesasi sensus.
- c. Registrasi Penduduk yaitu proses pengumpulan keterangan yang berhubungan peristiwa-peristiwa kependudukan harian dan kejadian-kejadian yang mengubah status seseorang, seperti peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan tempat tinggal dan kematian.

## B. Pendistribusian

### 1. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian kegiatan pemasaran yang berusaha mempelancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan.<sup>22</sup> Distribusi yang efektif akan memperlancar arus atau akses barang oleh konsumen sehingga dapat diperoleh kemudahan memperolehnya. disamping itu konsumen juga akan memperoleh barang sesuai dengan yang diperlukan. Produsen dan konsumen mempunyai kesenjangan spasial, waktu, nilai, keragaman dan kepemilikan produk karena perbedaan tujuan serta persepsi masing-masing. Dengan distribusi dapat diatasi kesenjangan antara produsen dan konsumen. Proses pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang mampu:

- 1). Menciptakan nilai tambah

---

<sup>22</sup> Wihana, *Pengantar Ekonomi Industri*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), h.40-42.

produk melalui fungsi-fungsi pemasaran. 2). Mempelancar arus saluran pemasaran secara fisik dan nonfisik.<sup>23</sup>

## 2. Nilai-Nilai Distribusi

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.<sup>24</sup>

### a. Keadilan.

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut.

### b. Kebebasan.

Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak

---

<sup>23</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.45.

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013), h.16-19.

kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap matrealistik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah.<sup>25</sup>

### 3. Sektor-Sektor Distribusi Pendapatan

Sektor-sektor distribusi pendapatan terbagi pada tiga bentuk, yakni sektor rumah tangga sebagai basis kegiatan produksi, sektor negara dan sektor industri, seperti yang akan diuraikan dibawah ini:<sup>26</sup>

#### a. Distribusi Pendapatan Sektor Rumah Tangga

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari *shadaqah*. *Shadaqah* dalam konteks terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: *shadaqah wajibah* dan *shadaqah nafilah*. Berikut pembagian bentuk-bentuk distribusi pendapatan sektor rumah tangga yakni: *Pertama*, *shadaqah wajibah* berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat, dan warisan. *Kedua*, *shadaqah nafilah* (*sunnah*) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunat seperti infaq, Aqiqah, dan wakaf. *Ketiga*, *hudud* (hukuman) adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen

---

<sup>25</sup> Yusuf, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya, Bina Islam, 2015), h.128.

<sup>26</sup> Wihana, *Pengantar Ekonomi Industri*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), h.79.

ini tidak bisa berdiri sendiri, tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya seperti Kafarat, Diyat, dan Nazar.<sup>27</sup>

b. Distribusi Pendapatan Sektor Negara

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata dan lain sebagainya. Negara itu juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan publik yang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat.<sup>28</sup>

Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak pendapatan BUMN dan sebagainya. Di samping itu, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membelanjakan anggaran untuk kepentingan bangsa dan negara misalnya, pemberian subsidi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Semua keistimewahan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara.

---

<sup>27</sup> Widiastuti, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia, (Jakarta, Grasindo, 2005), h. 98.

<sup>28</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2000), h. 67.

Kebijakan ekonomi politik diarahkan untuk melayani kepentingan individu dan umum sekaligus. Model ini menfokuskan kepada keseimbangan, dan keharmonisan kedua kepentingan tersebut. Kebijakan politik ekonomi Islam juga melayani kesejahteraan materil dan kebutuhan spiritual. Aspek ekonomi politik Islam yang dilakukan oleh para penguasa adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat.

c. Distribusi Pendapatan Sektor Industri

Distribusi pendapatan sektro industri terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, upah maupun sewa. *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pihak pemodal (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil. Pemodal, sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun, tidak punya kesempatan ataupun waktu untuk mengembangkan hartanya. Ia mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada pengusaha dalam bentuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang secara *mudharabah* (bagi hasil). *Musyarakah* merupakan kerja sama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil.<sup>29</sup>

Distribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan berhimpunnya beberapa pemodal dalam mendirikan suatu perusahaan seperti PT ataupun CV tentu akan memberikan peluang kepada masyarakat menjadi tenaga kerja pada perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapat pendapatan dalam bentuk upah atau gaji. Di samping

---

<sup>29</sup> Widiastuti, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia, (Jakarta, Grasindo, 2005), h. 102.

itu, rumah tangga yang mempunyai lahan ataupun bangunan yang digunakan perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk sewa.<sup>30</sup>

#### 4. Distribusi Dalam Islam

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusianya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (berkekurangan).<sup>31</sup>

Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi,dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya.<sup>32</sup> Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti

---

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013), h.130.

<sup>31</sup> Pedoman Umum, *Raskin*,(Jakarta: Mekanisme Pelaksanaan, 2018), h.24.

<sup>32</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013), h.79.

memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infaq, sadaqah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerja sama, misalnya distribusi dalam bentuk *mudharabah* merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama Muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi *profit sharing*.<sup>33</sup> Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha, tetapi tidak punya modal. Tujuan aturan-aturan ini menurut Afzalur Rahman adalah untuk mencegah pemuatan kekayaan kepada golongan tertentu.

Al-Quran berulang kali mengingatkan agar kamu Muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang harus mendapat bantuan. Menurut Yusuf Qaradhawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada instrument-instrumen parroduksi yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.45.

<sup>34</sup> Wihana, *Pengantar Ekonomi Industri*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), h.43-57.

- 1) Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah.
- 2) Bunga, yaitu Bungan sebagai imbalan dari uang modal.(*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek.
- 3) Sewa, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek.
- 4) Keuntungan, yaitu keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan pengelolaan.

Ekonomi Islam terbebas dari kedua kezoliman kapitalisme dan sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang menekankan pada distribusi pra produksi dan distribusi pendapatan pasca produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi dan hak kepemilikannya.<sup>35</sup> Apa hak dan kewajiban dari kepemilikan tersebut. Islam mempunyai perhatian terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dan upah mereka yang adil dan setimpal dengan kewajiban mereka tunaikan. Secara umum, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis *akhlik al-karimah* dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi.<sup>36</sup>

## 5. Sistem Distribusi dalam Islam

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan

---

<sup>35</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.89.

<sup>36</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013), h.10-18.

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan pendistribusian bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lainnya. Secara umum islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>37</sup> Apabila terjadi ketidak seimbangan distribusi kekayaan maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Oleh karena itu untuk mengakhiri kesengsaraan dimuka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi. Kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu. Islam menegaskan untuk para penguasa agar meminimalkan kesenjangan dan ketidak seimbangan distribusi. Tujuan distribusi dalam islam yaitu a). Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah kimunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, b).islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, c). Mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara, d). Memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah agar tercapai maslahah bagi seluruh masyarakat.<sup>38</sup> Sistem distribusi dalam Islam diantaranya:<sup>39</sup>

### 1) Akidah

Akidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia, ia mempunyai dampak yang kuat dalam cara berfikir seseorang. Akidah begitu

---

<sup>37</sup> Wihana, *Pengantar Ekonomi Industri*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), h123.

<sup>38</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013), h.130.

<sup>39</sup> Yusuf, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya, Bina Islam, 2015), h.129.

kuat pengaruhnya sehingga dapat mengendalikan manusia agar mau mengikuti ajaran yang diembannya.

## 2) . Moral

Moral berasala dari kata moralis, disini moralitas menunjuk kepada prilaku manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada moralitas berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal memberi sanksi jika melanggar. Akan tetapi hukum moral tidak tetapi menembus kedalam sehingga melihat hal yang bersifat niatnya saja.

## c) Hukum Syariah

Dengan adanya hukum syariah agar dalam menjalankan kegiatan ekonomi ada batasnya yaitu sesuai dengan jalan Al-Qura'an dan sunah.

## 3) Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezliman adalah tujuan utama dari risalah para rasul. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan prilaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan.

## 6. Tujuan Distribusi Pendapatan dalam Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat Islam (*maqashid al-*

*syariah*). Adapun tujuan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada:<sup>40</sup>

### 1). Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyalurah zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Begitu juga terhadap para *muzakki*, dengan menyerahkan sebagian hartanya karena Allah Ta'ala berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah.

### 2). Tujuan Pendidikan

Secara umum. Tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan *akhlik al-karimah* seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari *akhlik al-mazmumah*, seperti pelit. Loba, dan mementingkan diri sendiri.

### 3). Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah: a) Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim. b) Mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. c) Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan

---

<sup>40</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.54-57.

yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. d) Mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.

#### 4). Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yaitu:<sup>41</sup> a) Pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunat maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. b) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. c) Memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun, juga berkaitan dengan cara pendistribusianya di antara anggota masyarakat. d) Penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi.<sup>42</sup>

### 7. Konsep Moral Islam Dalam Distribusi Pendapatan

Menurut paham kapitalisme, setiap individu harus memiliki kebebasan sepenuhnya agar ia dapat memproduksi kekayaan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki sejak lahir. Paham kapitalisme juga mengakui tak terbatasnya hak individu dalam pemilikan pribadi serta menghalalkan pendistribusian yang tidak adil. Pandangan ekstrem lainnya yaitu paham komunisme menyetujui penghapusan kebebasan individu dan pemilikan peribadi secara menyeluruh dan pada saat

---

<sup>41</sup> Wihana, *Pengantar Ekonomi Industri*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), h.79.

<sup>42</sup> Yusuf, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya, Bina Islam, 2015), h.129.

yang sama menginginkan pemerataan ekonomi di antara penduduk. Dengan kata lain, paham kapitalisme menekankan pada produksi kekayaan, sedangkan paham komunisme pada distribusi kekayaan, dengan tidak memperhatikan dampaknya pada masyarakat.<sup>43</sup>

Dalam konteks ini, Islam mengambil jalan tengah antara pola kapitalis dan sosialis yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam kepemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang di bawah sistem ini ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas. Islam menganggap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna , paling mulia dan bahkan manusia diberi kepercayaan sebagai halifah yang bertugas untuk mengelola dunia guna untuk mencapai kemakmuran.<sup>44</sup>

Merujuk pada pesan Al-Qura'n dalam bidang ekonomi, dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi ataupun nonmateri dengan bekerja atau berjuang untuk mendapatkan harta atau materi dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah SWT, maka konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia,

---

<sup>43</sup> Pedoman Umum, *Raskin*,(Jakarta: Mekanisme Pelaksanaan, 2018), h.89.

<sup>44</sup> Yusuf, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya, Bina Islam, 2015), h.130.

tetapi lebih penting untuk maksimalisasi keuntungan akhirat. Urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat.<sup>45</sup>

Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.

#### 8. Pendataan Pendistribusian Menurut Pemerintah

Dalam menentukan rumah tangga miskin pemerintah menggunakan 14 variabel untuk menentukan apakah suatu rumah tangga layak dikategorikan miskin dan keempat variabel tersebut adalah:<sup>46</sup>

- 1). Luas bangunan, kecil bangun menentukan layak dikatakan miskin atau kaya seseorang.
- 2). Jenis lantai, lantai dari tanah masih dikatakan orang miskin.
- 3). Jenis dinding, dinding yang terbuat dari papan dan belum pemanen masih dikategorikan miskin.
- 4). Fasilitas buang air besar, toilet yang masih belum permanen.
- 5). Sumber air minum, sumber air minum yang belum memiliki sumur sendiri.
- 6). Sumber penerangan, lampu yang belum menggunakan listrik.

---

<sup>45</sup> Pedoman Umum, *Raskin*,(Jakarta: Mekanisme Pelaksanaan, 2018), h.78.

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia*,(Berita Resmi Statistik, 2009), .h67.

- 7). Jenis bahan bakar untuk memasak, yang belum menggunakan gas, atau masih menggunakan kayu bakar.
- 8). Frekuensi membeli daging, ayam dan susu, makanan yang sehat belum tentu satu bulan belum tentu terbeli.
- 9). Frekuensi makan dalam sehari, belum mencapai 3 kali sehari bahkan kurang.
- 10). Jumlah setel pakaian baru yang dibeli dalam setahun, dalam membeli baju masih minim.
- 11). Akses kepuskesmas, akses kesehatan belum terjamin.
- 12). Akses kelapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang masih serabutan.
- 13). Pendidikan terahir kepala rumah tangga, pendidikan yang masih rendah.
- 14). Kepemilikan beberapa aset, tidak memiliki aset yang cukup.

#### 9. Tingkat Keefektifan Distribusi Raskin

Efektivitas program distribusi Raskin dinilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dalam mencapai tujuan program pendistribusian Raskin yang telah ditetapkan. Yang menjadi kriteria tingkat efektivitas program Raskin ini ada 5 yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Harianto, *Pendapatan Harga dan Konsumsi Beras*, (Jakarta: Suryana, A. Dan S. Mardianto, 2001),h . 5 6 - 5 7 .

### 1). Tepat Sasaran

Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM). Rumah tangga yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut tidak berhak untuk menerima Raskin. Agar penyaluran lebih tepat sasaran, maka pendataan dilakukan secara berkala yakni diperbarui setiap tahun dengan melibatkan kepala lingkungan serta diawasi langsung oleh aparat desa dan aparat BPS sehingga segala bentuk penyimpangan maupun penyelewengan dapat diperkecil.

### 2). Tepat Jumlah

Jumlah Raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan. Jumlah tersebut sudah menjadi hak bagi setiap penerima manfaat Raskin dan sudah menjadi ketetapan pemerintah. Jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga miskin sudah sangat membantu keluarga miskin meskipun tidak mencukupi selama sebulan, namun dapat mengurangi pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pelaksanaan Raskin dikatakan mencapai indikator tepat jumlah jika RTS- PM menerima beras Raskin dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan, baik dalam setiap distribusi maupun dalam setiap tahun pelaksanaan. Alokasi beras per RTS-PM yang ditetapkan Pemerintah dalam setiap distribusi bervariasi antara 10-20 kg per RTS-PM, namun sebagian

besar ditetapkan 20 kg hingga tahun 2005 dan diubah menjadi 15 kg sejak 2006.

### 3). Tepat Harga

Harga Raskin adalah sebesar Rp 1,600/kg di titik distribusi. Harga tersebut merupakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masing-masing rumah tangga berhak mendapatkan harga Rp 1,600 tersebut, namun jika terdapat biaya distribusi dalam penyaluran beras, harga beras dapat berbeda tergantung dari kesepakatan pelaksana distribusi di tingkat kelurahan dengan masyarakat penerima manfaat. Pemerintah memberikan harga beras Raskin Rp 1,600 dengan tujuan membantu pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan mereka.

### 4). Tepat Waktu

Menurut Pedoman Raskin, ketepatan waktu pelaksanaan distribusi kepada RTS-PM tercapai apabila penyaluran Raskin dilaksanakan sesuai dengan rencana distribusi yang telah ditetapkan oleh Bulog. Sejak tahun 1999, penyaluran Raskin dilakukan 12 kali dalam satu tahun, kecuali pada 2006 (10 kali), pada 2007 (11 kali) , serta pada 2010 dan 2011 (13 kali). Frekuensi penyaluran raskin pada 2010 dan 2011 yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya merupakan upaya untuk mengantisipasi gejolak harga beras di pasaran yang selama dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Waktu pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTM penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi. Penyaluran Raskin sudah direncanakan oleh BULOG untuk setiap penyaluran beras tiap bulannya. Ketepatan waktu dalam penyaluran akan sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuan pangan.

#### 5). Tepat Adminitrasi

Tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam administrasi pelaporan tersebut tim koordinasi Raskin kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi harus melaporkan kepada tim koordinasi di tingkat atasnya secara periodik setiap tiga bulan. Selain itu, tim koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyusun laporan tahunan pada akhir tahun. Untuk kepentingan internal Bulog, sistim pelaporannya agak berbeda, yaitu Bulog tingkat kabupaten atau kota (subdivre/kansilog) harus melaporkan kepada Bulog tingkat provinsi (divre) secara mingguan dan bulanan, sementara itu divre melaporkan kepada Bulog secara mingguan. Selanjutnya, Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

#### g). Pendistribusian Menurut Ekonomi Islam

Secara umum Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral dalam pemeliharaan keadilan sosial dalam bidang ekonomi, sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam bidang distribusi, sebagaimana telah diketahui bahwa Nabi Muhamad SAW telah mengajarkan dasar-dasar nilai pendistribusian yang benar yaitu dengan kejujuran dan ketekunan. Adapun landasan dalam hal distribusi dalam Islam antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Tauhid

Yaitu konsep ketuhanan yang maha esa, yang tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah dan tidak ada pula yang menyekutukannya, konsep ini menjadi dasar segala sesuatu karena dari konsep inilah manusia menjalankan fungsi sebagai hamba yang melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al-Zumar ayat 38 yang *artinya*:

*“dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah, jika Allah hindak mendatangkan kemadharatan kepadaku, apakah berhala-berhala itu akan menghilangkan kemadharatan itu, atau jika Allah akan memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya?.*

### 2. Adil

Menurut bahasa adalah “wadh’u syaiin’ala mahaliha” yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, konsep keadilan haruslah diterapkan dalam mekanisme pasar untuk menghindari

kecurangannya dapat mengakibatkan kedzaliman bagi satu puhak.

Dalam firman Allah surat al-Muthafifin ayat 1-3 yang *artinya*:

*kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, apabila mereka menakar untuk orang lain mereka kurangi.*

### 3. Kejujuran Dalam Bertransaksi

Syarat Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi.

Firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 70 dan 71 maksudnya: *wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara. Supaya ia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu.*

## C. Beras Miskin (Raskin)

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bantuan beras yang diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga Sasaran. Keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat Sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.<sup>48</sup>

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok

---

<sup>48</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.98.

dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

Penyaluran RASKIN (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program oprasi pasar khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.<sup>50</sup>

Penyaluran raskin berawal dari surat perintah alokasi (SPA) dari pemerintah kabupaten atau kota kepada perum bulog dalam hal ini kepada kadivre atau kasubdivre atau kakansilok perum bulog berdasarkan beras miskin (tonase dan jumlah rumah tangga sasaran –RTS) dan rincian dimasing-masing kecamatan dan desa atau kelurahan.

Pada waktu beras akan didistribusikan ketitik distribusi, perum bulog berdasarkan SPA menerbitkan surat perintah pengeluaran barang beras untuk masing-masing kecamatan, desa atau kelurahan kepada satker raskin. Satker

---

<sup>49</sup> Pedoman Umum, *Raskin*,(Jakarta: Mekanisme Pelaksanaan, 2018), h.75.

<sup>50</sup> Pedoman Umum, *Raskin*,(Jakarta: Mekanisme Pelaksanaan, 2018), h.56.

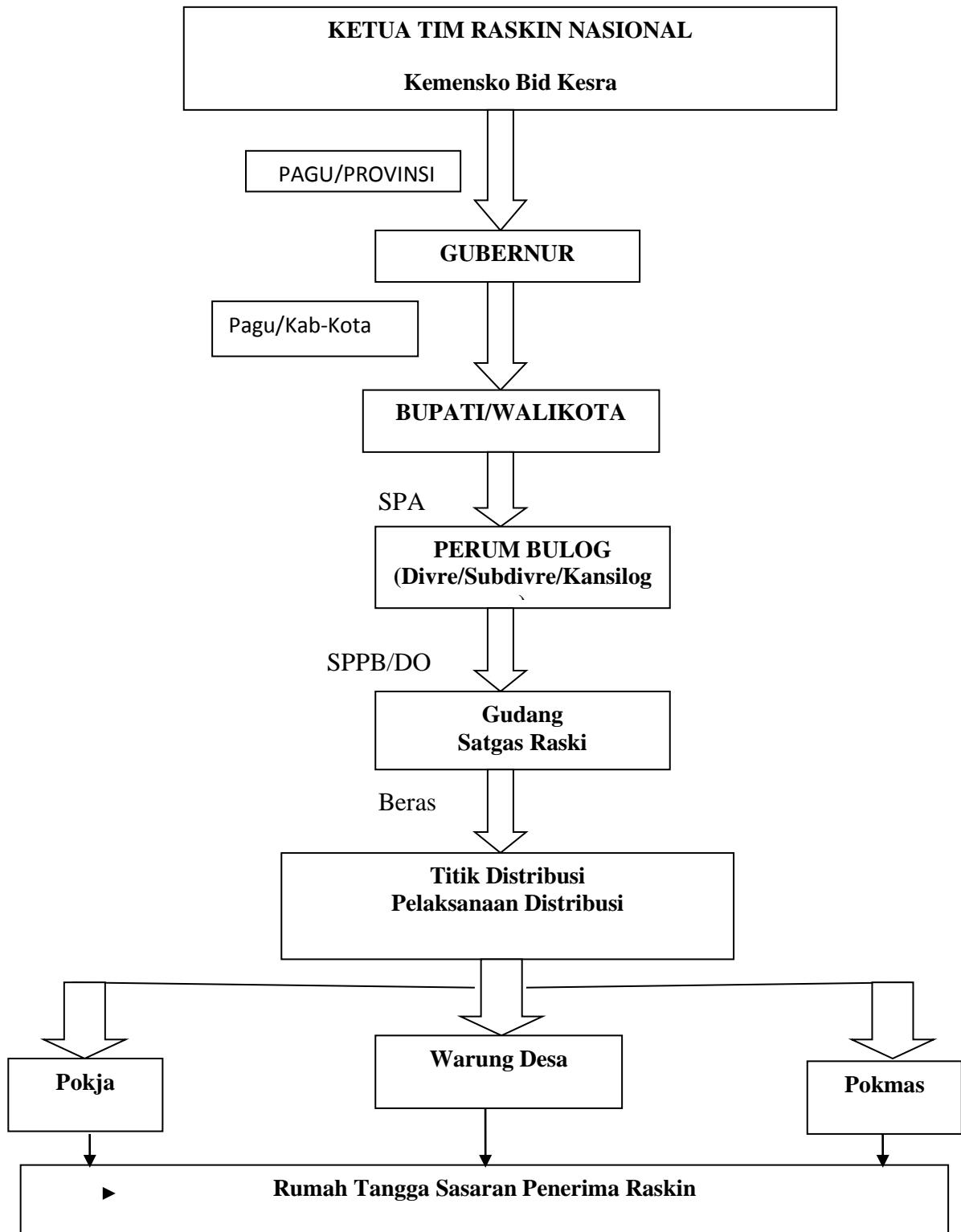
raskin mengambil beras digudang perum bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada pelaksana distribusi raskin dititik distribusi.

Di titik distribusi, penyerahan atau penjualan beras kepada RTS-PM (penerima manfaat) raskin dilakukan oleh salah satu dari tiga pelaksana distribusi raskin yaitu kelompok kerja (pokja), atau warung desa (wardes) atau kelompok masyarakat (pokmas). Dititik distribusi ini lah terjadi transaksi secara tunai dari RTS-PM raskin kepelaksanaan distribusi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.65-68.

1. Mekanisme Bantuan Raskin.<sup>52</sup>



<sup>52</sup> Bulog, *Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perum Bulog Tahun*, (Perum Bulog. Jakarta 2014) h.133.

## 2. Tujuan Bantuan Raskin

Tujuan Raskin Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (dalam Masta, 2016), bahwa tujuan Raskin adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Perlindungan Sosial Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Stabilitasi Harga beras dan Pengendali Inflasi Secara deskripsi terlihat bahwa pada saat Raskin rendah dalam penyaluran, terdapat beberapa titik harga beras dan anjil beras dalam inflasi yang meningkat.
- c. Peningkatan Produksi Beras Dalam Negeri Program Raskin tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tetapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani. Melalui pengadaan beras untuk Raskin ini, diharapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri, sehingga swasembada beras tetap dapat dipertahankan.
- d. Indikator Bantuan Raskin Menurut buku pedoman Raskin (2014) dan diperkuat seorang ahli menurut Sasongko (2009), menyatakan bahwa bantuan Raskin harus mengacu pada keenam indikator yaitu, tepat sasaran penerima, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Akan tetapi

---

<sup>53</sup> Bulog, *Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perum Bulog Tahun*, (Perum Bulog. Jakarta 2014) h.133.

peneliti dalam menyusun indikator bantuan raskin hanya menggunakan tiga indikator (tepat jumlah, tepat harga, dan kecukupan raskin yang diterima oleh keluarga).

## D. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikonomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata yaitu *oicos* yang artinya rumah dan *namos* artinya aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.<sup>54</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian beberapa ahli ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Monzer Kahf<sup>55</sup> memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu prilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (Agama, jiwa, akal, nasib dan harta).

---

<sup>54</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002) h. 18.

<sup>55</sup> Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009) h. 13.

## 2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis, insrtumental maupun institusional didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan dua sumber normative tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu di tempatkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, Al-Qur'an dan Hadist bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Untuk mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan oprasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islam, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antaranya:<sup>56</sup>

a. Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam

---

<sup>56</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM, 2005) h. 43-49.

- 1) Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasi secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- 2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
- 3) Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

b. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi pemborosan. Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

Allah SWT berfirman QS. Al-Furqaan: (25): 67<sup>57</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan

---

<sup>57</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 98.

perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan. Berdasarkan muatan kata adil yang ada dalam Al-Qur'an yaitu:<sup>58</sup>

1) Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam.

QS. Al-Hasyr (59):7<sup>59</sup>

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلَلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَىٰ السَّبِيلِ كُمْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ  
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَعْنَتْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya*

<sup>58</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005) h. 222.

<sup>59</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005) h. 256.

*bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

2) Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilah distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.

### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Berikut adalah Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang senantiasa ada dalam aturan Islam:<sup>60</sup>

#### a) Tidak Menimbulkan Kesenjangan Sosial

Prinsip dasar Islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak dengan masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada timbulnya kesenjangan. Misalnya saja seperti ekonomi kapitalis yang hanya mengedepankan aspek para pemodal saja tanpa mempertimbangkan aspek buruh, kemanusiaan, dan masayarakat marginal lainnya. Untuk itu, islam memberikan aturan kepada umat islam untuk saling membantu dan tolong menolong. Dalam islam memang terdapat istilah kompetisi atau berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan.

---

<sup>60</sup> Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011),h. 166.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti mengesampingkan aspek keadilan dan peduli pada sosial. Hal ini sebagaimana perintah Allah, “*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*” (QS An-Nur : 56)

Zakat, infaq, dan shodaqoh adalah jalan islam dalam menyeimbangkan ekonomi. Yang kaya atau berlebih harus membantu yang lemah dan yang lemah harus berjuang dan membuktikan dirinya keluar dari garis ketidakberdayaan agar mampu dan dapat produktif menghasilkan rezeki dari modal yang diberikan padanya.

a). Tidak Bergantung Kepada Nasib yang Tidak Jelas

*Artinya:* “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:* “*Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.*” (QS Al-Baqarah : 219).

Islam melarang umatnya untuk menggantung nasib kepada hal yang sangat tidak jelas, tidak jelas ikhtiarinya, dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata. Untuk itu Islam melarang perjudian dan mengundi nasib dengan anak panah sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi. Pengundian nasib adalah proses rezeki yang dilarang oleh Allah karena di dalamnya manusia tidak benar-benar mencari nafkah dan memakmurkan kehidupan di bumi. Uang yang ada hanya diputar itu-itu saja, membuat kemalasan, tidak produktifnya hasil

manusia, dan dapat menggeret manusia pada jurang kesesatan atau lingkaran setan. Untuk itu, prinsip ekonomi islam berpegang kepada kejelasan transaksi dan tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas, apalagi melalaikan ikhtiar dan kerja keras.

c). Mencari dan Mengelola Apa yang Ada di Muka Bumi

*Artiny: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al Jumuah : 10).”*

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk dapat mengoptimalkan dan mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini seperti mengoptimalkan hasil bumi, mengoptimalkan hubungan dan transaksi dengan sesama manusia. Untuk itu, jika manusia hanya mengandalkan hasil ekonominya dari sesuatu yang tidak jelas atau seperti halnya judi, maka apa yang ada di bumi ini tidak akan teroptimalkan. Padahal, ada sangat banyak sekali karunia dan rezeki Allah yang ada di muka bumi ini. Tentu akan menghasilkan keberkahan dan juga keberlimpahan nikmat jika benar-benar dioptimalkan. Untuk itu, dalam hal ekonomi prinsip islam adalah jangan sampai manusia tidak mengoptimalkan atau membiarkan apa yang telah Allah berikan di muka bumi dibiarkan begitu saja. Nikmat dan rezeki Allah dalam hal ekonomi akan melimpah jika manusia dapat mencari dan mengelolanya dengan baik.

#### d). Larangan Ekonomi Riba

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”* (QS Al-Baqarah :278)

Prinsip Islam terhadap ekonomi yang lainnya adalah larangan riba. Riba adalah tambahan yang diberikan atas hutang atau transaksi ekonomi lainnya. Orientasinya dapat mencekik para peminjam dana, khususnya orang yang tidak mampu atau tidak berkecukupan. Dalam Al-Quran Allah melaknat dan menyampaikan bahwa akan dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang menggunakan riba dalam ekonominya.

#### e). Transaksi Keuangan yang Jelas dan Tercatat

Transaksi keuangan yang diperintahkan islam adalah transaksi keuangan yang tercatat dengan baik. Transaksi apapun di dalam islam diperintahkan untuk dicatat dan ditulis diatas hitam dan putih bahkan ada saksi. Dalam zaman modern ini maka ilmu akuntansi tentu harus digunakan dalam aspek ekonomi. Hal ini tentu saja menghindari pula adanya konflik dan permasalahan di kemudian hari. Manusia bisa saja lupa dan lalai, untuk itu masalah ekonomi pun harus benar-benar tercatat dengan baik. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan, *artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah<sup>l</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah*

*seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”* (QS Al Baqarah : 282).

f). Keadilan dan Keseimbangan dalam Berniaga

*Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS Al Isra : 35). Allah memerintahkan manusia ketika melaksanakan perniagaan maka harus dengan keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga menjadi dasar untuk ekonomi dalam islam. Perniagaan haruslah sesuai dengan neraca yang digunakan, transaksi keuangan yang digunakan, dan juga standar ekonomi yang diberlakukan. Jangan sampai ketika bertransaksi kita membohongi, melakukan penipuan, atau menutupi kekurangan atau kelemahan dari apa yang kita transaksikan. Tentu saja, segalanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

Dari prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami bahwa manusia diberikan aturan dasar mengenai ekonomi islam agar manusia dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia , hakikat penciptaan manusia , konsep manusia dalam islam, dan hakikat manusia menurut islam sesuai dengan fungsi agama , dunia menurut Islam, sukses menurut Islam, sukses dunia akhirat menurut Islam, dengan cara sukses menurut Islam. Tentu saja dari prinsip tersebut dapat terlihat bahwa islam hendak memberikan rahmat bagi semesta alam, terlebih bagi mereka yang beriman dan ta’at dalam melaksanakan perintah Allah tersebut.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **1. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kelurahan lubuk lintang terletak di pusat Ibu Kota Kabupaten Seluma kurang lebih 100 M dari permukaan laut dengan fotografi wilayah berbukit-bukit dengan jenis kesuburan tanah warna merah lempung berpasir yang terletak terletak dikawasan pertokoan, perkantoran dan wisata (kawasan campuran) berbatas wilayah:<sup>61</sup>

Sebelah Utara : Kelurahan Dusun Baru dan Kec. Seluma Utara

Sebelah Selatan : Kelurahan Pasar Tais dan Kelurahan Lubuk Kebur

Sebelah Timur : Kelurahan bungamas

Sebelah Barat : Kelurahan Talang Saling

Luas wilayah 364 Ha yang mempunyai irigasi tehnis tapi tidak mempunyai lahan sawah, hanya tersedia lahan kering yang dipergunakan sebagai lahan:

1. Pemukiman : 82 Hektar
2. Perkarangan : 90 Hektar
3. Perkebunan Perorangan : 150 Hektar
4. Perkantoran Pemerintah : 5 Hektar
5. Taman Kota : 2 Hektar
6. Tempat Pemakaman : 1 Hektar
7. Pertokoan : 15 Hektar

---

<sup>61</sup> Lurah, *Profil Data Kelurahan Lubuk Lintang*, 2016.

8. Jalan : 18 Hektar

9. Usaha Perikanan Pemerintah : 1 Hektar

Sedangkan kalau dilihat dari sumber mata pencarian masyarakat Kelurahan Lubuk Litang 15% berusaha dibidang pertanian, perkebunan dan tanaman pangan, namun lahan yang tersedia hanya lahan perkebunan dan untuk lahan sawah semua petani semua mempunyai lahan diluar Kelurahan Lubuk Lintang, dibidang perternakan hanya memelihara ternak sembilan antara lain ayam, itik, kambing, dan sapi. Dibidang kehutanan tidak tidak mempunyai lahan hutan yang dikatakan jenis hutan maupun hasilnya.<sup>62</sup>

Untuk lahan perikanan, tidak ada lahan yang dimiliki masyarakat didalam wilayah Kelurahan Lubuk Lintang. Dibidang sumber sumber daya manusian di Kelurahan Lubuk Lintang khusus dibidang pendidikan, sekolah yang tersedia hanya 1 Unit gedung TK, untuk SD, SLTP, SLTA maupun universitas tidak ada, walaupun demikian penduduknya banyak yang berpendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA. Semua yang diuraikan diatas dapat dilihat pada profil terlampir.

a. Luas wilayah : 364 HA (3.6440.000 M)

b. Jumlah Penduduk : KK = 391 (Laki-Laki = 341, Perempuan = 50)

Jiwa = 1382 (Laki-Laki = 695, Perempuan = 687)

---

<sup>62</sup> Lurah, *Profil Data Kelurahan Lubuk Lintang*, 2016

c. Objek Pariwisata : Bendungan Seluma

Tempat Objek Wisata : Jl. Pasirah Z Abidin RT. 07 RW. 03 Kelurahan Lubuk Lintang

Jarak dari Ibu Kota : 1 KM

Jarak dari Ibu Kota Provinsi 60 KM

## B. Pendataan Wilayah

Asal usul nama Lubuk Lintang menjadi nama Kelurahan sampai dengan saat ini, kronologisnya dizaman nenek moyang terdahulu sebelum Indonesia Merdeka, sungai adalah merupakan jalan transportasi masyarakat, begitu juga dengan sungai air seluma, air yang paling dalam disebut lubuk merupakan tempat berlabuh alat trasportasi masyarakat, setiap lubuk diberi nama salah satu lubuk disungai seluma diberi nama Lubuk Lintang, oleh karena itu lubuk letaknya melintang sungai disekelilingnya menjadi perkampungan masyarakat diberi nama Dusun Lubuk Lintang yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Semakin lama semakin ramai zaman terus berubah menjadi kedepatian di kepala oleh seorang Depati.<sup>63</sup>

Semakin lama semakin berkembang setelah dihapusnya marga kedepatian berubah menjadi Desa di kepala oleh Kepala Desa yaitu menjadi nama Desa Lubuk Lintang. Sedangkan Wilayah Penggawa Lubuk Lintang di Talang Kebat dimekarkan menjadi Desa Lubuk Kebur. Setelah itu pemerintah mengeluarkan perda tahun 2009 yang

---

<sup>63</sup> Lurah, *Profil Data Kelurahan Lubuk Lintang*, 2016

direalisasikan tahun 2010 Desa menjadi Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.

a. Aparatur Kelurahan<sup>64</sup>

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	PNS KELURAHAN	7	Aktif
2	POLRI	1	Aktif
3	TNI	1	Aktif
4	DOKTER	4	Aktif
5	BIDAN	1	Aktif
6	PERAWAT	18	Aktif
7	GURU TK	7	Aktif
8	GURU SD	9	Aktif
9	GURU SLTP	15	Aktif
10	GURU SLTA	21	Aktif

---

<sup>64</sup> Lurah, *Profil Data Kelurahan Lubuk Lintang*, 2016

b. Gedung Perkantoran<sup>65</sup>

NO	Gedung Kantor	Jumlah	Keterangan
1.	Kelurahan	1	Aktif
2.	Polsek	-	Tidak Ada
3.	Koramil	1	Aktif
4.	Puskesmas	1	Aktif
5.	Balai Desa	1	Aktif
6.	UPKD	1	Tidak Aktif
7.	Tk	1	Tidak Ada
8.	SD	-	Tidak Ada
9.	SLTP	-	Tidak Ada
10.	SLTA	-	Tidak Ada
11.	Bank Danamon Ranting Tais	1	Aktif
12.	Bri Syariah Ranting Tais	1	Aktif
13.	BNI Ranting Rais	1	Aktif
14.	KANTOR PU Provinsi		Aktif

---

<sup>65</sup> Lurah, *Profil Data Kelurahan Lubuk Lintang, 2016*

c. Perkebunan<sup>66</sup>

No	Jenis Tanaman	Luas	Jumlah Pemilik	Hasil
1	Sawit	Kurang Lebih 90 H	50 Orang	Baik
2	Karet	Kurang Lebih 36 H	35 Orang	Baik
3	Kelapa	Kurang Lebih 4 H	3 Orang	Baik
4	Jeruk	Kurang Lebih 2 H	1 Orang	Baik
5	Coklat	Kurang Lebih 3 H	3 Orang	Baik
6	Lada	Kurang Lebih 3 H	2 Orang	Baik
7	Pinang	Kurang Lebih 2 H	2 Orang	Baik
8	Cengkoh	Kurang Lebih 5 H	4 Orang	Baik
9	Kopi	Kurang Lebih 5 H	4 Orang	Baik

---

<sup>66</sup> Lurah, *Profil Data Kelurahan Lubuk Lintang, 2016*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2002 pemerintah indonesia meluncurkan program raskin yang merupakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat.<sup>67</sup>

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.<sup>68</sup>

Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Sejak manusia dihadirkan di dunia ini sudah memiliki garis kehidupannya masing-masing, dan juga mereka harus bisa hidup dan berbaur bersama orang lain, tentunya dengan orang baik. Manusia juga memiliki tanggung jawab yang wajib dilakukannya yaitu selalu bertakwa kepada sang pencipta atau

---

<sup>67</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013), h.79.

<sup>68</sup> Djasalim, Saladin, *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*, (Bandung: Linda Karya, 2013), h.45.

Tuhan yang telah memberikan penghidupan bagi manusia di dunia. Namun sejalan dengan itu manusia juga memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraannya di dunia, dimana manusia harus memiliki sifat jujur dan amanah, menjalankan pekerjaan sesuai dengan dengan aturan pemerintah karena didalam ekonomi Islam menganjurkan manusia untuk adil, dan jujur agar apa yang dilakukan menjadi berkah. Dan manusia harus tetap berpegang teguh pada Tauhid karna konsep ini menjadi dasar dari segala sesuatu karena dari konsep ini manusia menjalankan fungsi sebagai manusia melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya.

Dalam Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dengan sungguh-sungguh serta mengikuti aturan yang ada, mampu mengembangkan amanah yang diberikan oleh atasan, sehingga pekerjaan yang dilakukannya menjadi berkah bagi dirinya ataupun orang lain. Dalam hal ini juga manusia diwajibkan untuk bersikap adil terhadap manusia tidak pilih kasih serta tidak boleh membeda-bedakan sehingga tidak terjadi permusuhan antar sesama.<sup>69</sup>

Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam hal keadilan atau bekerja tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, seperti bantuan beras miskin yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang benar-benar miskin, sehingga masyarakat miskin dapat terbantu kehidupannya dengan adanya bantuan tersebut. Pemerintah juga

---

<sup>69</sup> Pedoman Umum, *Raskin*,(Jakarta: Mekanisme Pelaksanaan, 2018), h.17.

harus melakukan pembaharuan pendataan dan pendistribusian kepada setiap masyarakat atau warganya, sehingga sesuai dengan pedoman 5T.<sup>70</sup>

Dalam hal ini bantuan raskin atau beras miskin untuk warga atau masyarakat juga terjadi di Bengkulu yaitu tepatnya di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma, masih banyak warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka berhak mendapatkan bantuan beras miskin dari pemerintah setempat.

Namun fakta dilapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam melakukan pendataan terhadap warganya, menurut hasil surve yang peneliti laakukan bahwa banyak warga yang kecewa terhadap pemerintahan setempat dalam melakukan pembagian raskin kepada masyarakat karena dinilai pemerintahan setempat tidak adil dalam pembagian dan tidak sesuai dengan pedoman 6T, karena pembagian raskin tidak dilakukan pendataan yang benar, sehingga banyak yang tidak sesui, seperti warga miskin tidak mendapatkan bantuan sedangkan warga yang mampu mendapat bantuan, harga pembelian beras lebih besar, kualitas beras yang buruk dan keterlambatan pembagian raskin sedangkan dalam Islam pembagian maupun pendataan harus dilakukan dengan jujur dan adil serta amanah.<sup>71</sup>

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada informan yaitu

---

<sup>70</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013), h.79.

<sup>71</sup> Suradi Wawancara, 1 Desember 2017.

Surhani selaku lurah menjawab beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu:<sup>72</sup>

Jumlah KK dalam Satu Kelurahan	Jumlah Rt dalam Kelurahan	Jumlah KK Penerima Raskin Dalam Kelurahan
415 KK dalam satu kelurahan	9 Rt	32 KK

“Cara saya melakukan pendataan kepada warga yaitu dengan menyuruh petugas untuk surve satu persatu kerumah-rumah warga dan sehingga petugas dapat melihat langsung kondisi warga apakah memang mereka miskin atau tidak, petugas yang lebih paham dalam hal surve seperti ini kami serahkan kepada ketua RT masing-masing, sehingga RT memberikan data-data kepada kami kelurahan. Kalau cara pendistribusianya tetap RT yang bertanggung jawab, kelurahan hanya memberikan bantuan banyaknya data yang telah ditentukan”.

“Warga yang berhak mendapatkan bantuan beras miskin kami sesuaikan dengan panduan dari pemerintah yaitu dilihat dari kesejahteraan mereka, bagaimana kondisi rumah apakah belum permanen, dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pokok”.

“Pendataan dan pendistribusian terhadap warga telah dilakukan sesuai dengan pedoman 5T, hal itu terbukti pendataan bagi warga yang mendapatkan bantuan raskin dilihat dari rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, ketepatan dalam pembagian beras raskin, harga beras juga sesuai dengan harga subsidi dari pemerintah pusat”.

“Warga mendapatkan bantuan beras rakin dan berapa harga yang harus dibayar untuk menebus beras supsidi tersebut sebanyak 15 kg dalam satu bulan, dana yang dikeluarkan untuk menebus beras miskin sebanyak Rp.1.600/kg”.

Hal lain juga disampaikan oleh ketua RT 1 yaitu:<sup>73</sup>

“Warga yang menerima bantuan beras miskin sebanyak 3 KK, berikut data warga yang menerima bantuan raskin”.

---

<sup>72</sup> Haidir Wawancara, 1 Desember 2017.

<sup>73</sup> Ketua Rt 1, Wawancara 1 Desember 2018.

No	Nama	Pekerjaan
1	Rohman/Sri	Tani
2	Diran/Jumini	Tani
3	Masron/Sari	Tani

“Yang melakukan pendataan serta pendistribusian kepada warga adalah saya sendiri, dan cara saya melakukan pendataan dan pendistribusian kepada warga yaitu menggunakan pedoman 5T yaitu dilihat dari tingkat kesejahteraanya warga, apabila warga rumahnya masih belum permanen dan belum berlantai biasanya itu yang kami tuju.” Pendataan dan pendistribusian itu selalu ada pembaharuan dari kami namun biasanya data tidak mengalami banyak perubahan, karena bisa dilihat keseharian dari mereka. Seperti yang saya katakan bahwa kami melakukan pendataan maupun pendistribusian itu menggunakan pedoman atau target 5T yaitu tepat waktu, tepat harga dan lain-lain. Banyak jumlah beras yang di dapat warga yaitu sebanyak 15kg, dan warga harus menebusnya dengan harga Rp.1.600”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua RT 2 yaitu:<sup>74</sup>

“Warga yang menerima bantuan beras miskin sebanyak 5 KK, berikut data warga yang menerima bantuan raskin”.

No	Nama	Pekerjaan
1	Rian/anisa	Tani
2	Napis/arum	Tani
3	Sani/Anita	Tani
4	Hani/Neti	Tani
5	Kahar/Jul	Tani

“Yang melakukan pendataan serta pendistribusian kepada warga adalah saya sendiri, dan cara saya melakukan pendataan dan pendistribusian kepada warga yaitu menggunakan pedoman 5T yaitu dilihat dari tingkat kesejahteraanya, warga yang rumahnya masih belum permanen dan belum berlantai, belum memiliki kamara mandi di dalam dan belum ada WC, dan rumah masih jauh dari kata layak untuk dihuni.” Pendataan dan pendistribusian itu selalu ada pembaharuan dari kami namun biasanya data tidak mengalami banyak perubahan, karena bisa dilihat keseharian dari mereka. Seperti yang saya katakan bahwa kami melakukan pendataan maupun pendistribusian itu menggunakan pedoman atau target 5T yaitu tepat waktu, tepat harga dan lain-lain. Banyak jumlah beras yang di dapat warga yaitu sebanyak 15kg, dan warga harus menebusnya dengan harga Rp.1.600”.

---

<sup>74</sup> Ketua Rt 2, Wawancara 1 Desember 2018.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua RT 3 yaitu:<sup>75</sup>

“Warga yang menerima bantuan beras miskin sebanyak 2 KK, berikut data warga yang menerima bantuan raskin”.

No	Nama	Pekerjaan
1	Agung/Sumi	Tani
2	Korun/Nurul	Tani

“Yang melakukan pendataan serta pendistribusian kepada warga adalah petugas lurah, dan caranya melakukan pendataan dan pendistribusian kepada warga yaitu menggunakan pedoman 5T yaitu dilihat dari tingkat kesejahteraanya warga, apabila warga rumahnya masih belum permanen dan belum berlantai biasanya itu yang kami tuju.” Pendataan dan pendistribusian itu selalu ada pembaharuan dari kami namun biasanya data tidak mengalami banyak perubahan, karena bisa dilihat keseharian dari mereka. Seperti yang saya katakan bahwa kami melakukan pendataan maupun pendistribusian itu menggunakan pedoman atau target 5T yaitu tepat waktu, tepat harga dan lain-lain. Banyak jumlah beras yang di dapat warga yaitu sebanyak 15kg, dan warga harus menebusnya dengan harga Rp.1.600”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua RT 4 yaitu:<sup>76</sup>

“Warga yang menerima bantuan beras miskin sebanyak 3 KK, berikut data warga yang menerima bantuan raskin”.

No	Nama	Pekerjaan
1	Aury/Sri	Tani
2	Fahrul/Sri	Tani
3	Roni/Santi	Tani

ss

“Yang melakukan pendataan serta pendistribusian kepada warga adalah saya, dan cara saya melakukan pendataan dan pendistribusian kepada warga yaitu menggunakan pedoman 5T yaitu dilihat dari tingkat kesejahteraanya warga, apabila warga rumahnya masih belum permanen dan belum berlantai biasanya itu yang kami tuju.” Pendataan dan pendistribusian itu selalu ada pembaharuan dari kami namun biasanya data tidak mengalami banyak perubahan, karena bisa dilihat keseharian dari mereka. Seperti yang saya katakan bahwa kami melakukan pendataan maupun pendistribusian itu menggunakan pedoman atau target 5T yaitu

---

<sup>75</sup> Ketua Rt 3, Wawancara 1 Desember 2018

<sup>76</sup> Ketua Rt 4, Wawancara 1 Desember 2018

tepant waktu, tepat harga dan lain-lain. Banyak jumlah beras yang di dapat warga yaitu sebanyak 15kg, dan warga harus menebusnya dengan harga Rp.1.600”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua RT 5 yaitu:<sup>77</sup>

“Warga yang menerima bantuan beras miskin sebanyak 7 KK, berikut data warga yang menerima bantuan raskin”.

No	Nama	Pekerjaan
1	Aril/Uus	Tani
2	Napis/arum	Tani
3	Ocit/Sari	Tani
4	Hani/Neti	Tani
5	Jari/Sri	Tani
6	Hari/Kus	Tani
7	Dero/Jainah	Tani

“Yang melakukan pendataan serta pendistribusian kepada warga adalah petugas lurah, dan cara saya melakukan pendataan dan pendistribusian kepada warga yaitu menggunakan pedoman 5T yaitu dilihat dari tingkat kesejahteraanya warga, apabila warga rumahnya masih belum permanen dan belum berlantai biasanya itu yang kami tuju.” Pendataan dan pendistribusian itu selalu ada pembaharuan dari kami namun biasanya data tidak mengalami banyak perubahan, karena bisa dilihat keseharian dari mereka. Seperti yang saya katakan bahwa kami melakukan pendataan maupun pendistribusian itu menggunakan pedoman atau target 5T yaitu tepat waktu, tepat harga dan lain-lain. Banyak jumlah beras yang di dapat warga yaitu sebanyak 15kg, dan warga harus menebusnya dengan harga Rp.1.600”.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat atau warga RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan RT 5 seperti yang disampaikan oleh bapak Rohman/Sri RT 1 yaitu:<sup>78</sup>

“Saya mendapatkan bantuan beras miskin dari pemerintah, dan saya sudah lama mendapatkannya sekitar 2 tahun lebih. Warga disini tidak banyak yang mendapat bantuan. Tapi banyak warga yang kecewa karena dalam pembagian banyak yang tidak tepat sasaran, seperti warga yang tidak mampu tidak diberi bantuan tapi warga yang mampu atau kaya malah dapat bantuan. Ada juga warga yang sudah tidak berdomisili di Rt

---

<sup>77</sup> Ketua Rt 5, Wawancara 1 Desember 2018

<sup>78</sup> Rohman/Sri, Wawancara, 1 Desember 2018.

atau kelurahan lubuk lintang juga masih dapat dan masih ada namanya dalam data. Saya sendiri tidak terlalu paham bagaimana mereka melakukan pendataan kepada kami, tiba-tiba sudah ada pengumuman dari Rt bahwa saya telah dapat bantuan. Tidak ada petugas atau siapapun yang datang kerumah untuk mendata. Kalau pendataan itu diperbaharui atau tidak kami tidak tau, jelasnya yang dapat masih yang itu-itu saja , sepertinya tidak ada pembaharuan data. Menurut saya pribadi pembagian beras dan pendataan belum sesuai dengan pedoman ataupun aturan pemerintah karena masih banyak kurangnya seperti dalam penebusan beras kami harus membayar sebesar Rp.4000.00/kg sedangkan dari pemerintah harga yang diperuntukkan hanya sebesar Rp.1.600 dan juga beras sering terlambat dalam pembagian.

**Tabel Keluarga Informan**

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan Rumah
Rohman	Tani	Rp.700.000	Semi Permanen
Sri	Buruh	Rp. 300.00	

Hal lain juga disampaikan oleh Diran/Jumini Rt 1 yaitu:<sup>79</sup>

“Ia saya dapat bantuan dari pemerintah berupa beras, dan itupun baru saya dapat 2 kali pembagian karena saya usul dengan ketua Rt sehingga saya dapat karena kebetulan ada warga yang tidak berdomisili di desa ini lagi tapi dia masih dapat sehingga saya yang menggantikannya. Tidak banyak warga yang dapat sekitar 5 KK. Cara pendataanya mungkin dilihat dari tingkat kesejahteraan warganya tapi kalau disini masih banyak yang salah dalam pendataan. Tidak ada petugas yang datang, namun mereka hanya meminta kami untuk mengumpulkan KTP dan juga KK ke ketua RT masing-masing. Sepertinya belum ada pembaharuan data karena sampai saat ini nama saya saja masih tetap nama yang orang saya gantikan dulu. Pembagian beras raskin belum sesuai dengan aturan pemerintah karena masih banyak kekurangan dan juga belum amanah yang bertugas dalam pembagian beras, contoh beras yang harus diambil harus ditebus dengan harga yang lebih mahal dengan berbagai alasan, serta warga harus membayar tebusan sebesar Rp. 4000/kg”.

**Tabel Keluarga Informan**

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan
------	-----------	------------	---------

---

<sup>79</sup> Diran/Jumini, Wawancara, 1 Desember 2018.

			<b>Rumah</b>
Diran	Tani	Rp.300.000	Semi Permanen
Jumini	Tani	Rp. 300.00	

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asmad/Eti informan yang tidak mendapat bantuan dari RT 1 menyatakan bahwa:<sup>80</sup>

“Saya tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Sudah lama bahkan tidak pernah sama sekali saya menerima bantuan beras, padahal jika dibandingkan dengan yang lain saya orang yang tidak mampu, pekerjaan saya buruh harian, istri saya hanya sebagai pencari sayuran. Cara pendataan mungkin dilihat dari kekeluargaan ataupun kedekatan dengan ketua RT atau yang lain. Tidak ada petugas yang datang kerumah. Saya rasa belum ada pendataan baru karena saya belum juga dapat orang yang benar-benar tidak mampu.”

**Tabel Keluarga Informan**

<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Pendapatan Bulanan</b>	<b>Keadaan Rumah</b>
Asmad	Tani	Rp.200.000 tidak pasti	Papan
Eti	Tani	Rp. 200.00	

Hal lain juga disampaikan oleh Sani/Anita RT 2 bahwa:<sup>81</sup>

“Saya dapat bantuan dari pemerintah berupa beras, sudah lama sejak saya tinggal disini. Tidak banyak warga yang dapat sekitar 5 KK sampai tuju KK, tidak sama antara RT. Cara pendataanya mungkin dilihat dari tingkat kesejahteraan. Tidak ada petugas yang datang, namun mereka hanya meminta kami untuk mengumpulkan KTP dan juga KK ke ketua RT masing-masing. Sepertinya belum ada pembaharuan data. Pembagian beras raskin belum sesuai dengan aturan pemerintah karena warga harus membayar tebusan beras perkilo Rp. 4000/kg.”

**Tabel Keluarga Informan**

---

<sup>80</sup> Asmad/Eti, Wawancara 1 Desember 2018.

<sup>81</sup> Sani/Anita, Wawancara 1 Desember 2018.

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan Rumah
Sani	Tani	Rp.2000.000	Semi Permanen
Anita	Tani	Rp. 1000.000	

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kahar/Jul RT 2 bahwa:<sup>82</sup>

“Saya mendapat bantuan beras miskin, dan hal itu sudah lama sejak saya berdomisili disini. Warga yang mendapat bantuan beras miskin tidak sama dalam satu RT. Cara pendataanya yaitu dengan diminta untuk mengantarkan KTP dan KK kepada ketua RT. Tidak ada petugas yang datang untuk mendata. Tidak ada pembaharuan data. Menurut saya pembagian raskin belum sesuai dengan aturan karena masih banyak kekurangan seperti beras yang datangnya tidak pasti kadang 3 bulan sekali kadang 6 bulan sekali, dan kualitas beras yang kurang bagus serta setiap warga harus menebus Rp.4000/kg.

**Tabel Keluarga Informan**

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan Rumah
Kahar	Wiraswasta	Rp.1500.000	Semi Permanen
Jul	Wiraswasta	Rp. 750.000	

Hal lain juga disampaikan oleh Agung/Sumi RT 3 yaitu:<sup>83</sup>

“Saya dapat beras bantuan beras miskin. Sudah lama saya dapat. Warga yang dapat Bantuan tidak banyak hanya sekitar 5-7 KK bahkan ada yang hanya 2 KK saja. Cara pendataannya dengan mengantarkan KTP dan KK, karena tidak ada petugas yang datang mendata. Tidak ada perubahan data dari pemerintah. pembagian dan pendataan raskin belum sesuai aturan pemerintah karena masih banyak warga yang didata adalah warga yang mampu dan setiap warga harus menebus Rp.4000/kg.”

---

<sup>82</sup> Kahar/Jul, Wawancara 1 Desember 2018.

<sup>83</sup> Agung/Sumi, Wawancara 1 Desember 2018.

**Tabel Keluarga Informan**

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan Rumah
Agung	Tani	Rp.400.000	Semi Permanen
Sumi	Tani	Rp. 200.00	

Hal lain juga disampaikan oleh Korun/ Nurul Rt 3 yaitu:<sup>84</sup>

“Saya dapat bantuan dari pemerintah berupa beras. Tidak banyak warga yang dapat kurang lebih sekitar 2-7 KK. Cara pendataanya mungkin dilihat dari tingkat kesejahteraan warganya tapi kalau disini masih banyak yang salah dalam pendataan. Tidak ada petugas yang datang, namun mereka hanya meminta kami untuk mengumpulkan KTP dan juga KK ke ketua RT masing-masing. Sepertinya belum ada pembaharuan data. Pembagian beras raskin belum sesuai dengan aturan pemerintah karena masih banyak kekurangan dan juga belum amanah yang bertugas dalam pembagian beras, contoh beras yang harus diambil harus ditebus dengan harga yang lebih mahal dengan berbagai alasan, serta warga harus membayar tebusan sebesar Rp. 4000/kg”.

**Tabel Keluarga Informan**

Nama	Pekerjaan	Pendapatan Bulan	Keadaan Rumah
Korun	Wiraswasta	Rp.500.000	Semi Permanen
Nurul	Wiraswasta	Rp. 250.000	

Hal lain juga disampaikan oleh Aury/Sri Rt 4 yaitu:<sup>85</sup>

“Saya dapat bantuan dari pemerintah berupa beras, sudah lama sejak saya tinggal disini. Tidak banyak warga yang dapat sekitar 5 KK. Cara pendataanya mungkin dilihat dari tingkat kesejahteraan. Tidak ada petugas yang datang, namun mereka hanya meminta kami untuk

---

<sup>84</sup> Korun/Nurul, Wawancara 1 Desember 2018.

<sup>85</sup> Aury/Sri, Wawancara, 1 Desember 2018.

mengumpulkan KTP dan juga KK ke ketua RT masing-masing. Sepertinya belum ada pembaharuan data. Pembagian beras raskin belum sesuai dengan aturan pemerintah karena warga harus membayar tebusan beras perkilo Rp. 4000/kg.”

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan Rumah
Aury	Wiraswasta	Rp.1500.000	Semi Permanen
Sri	Wiraswasta	Rp. 750.000	

Hal lain juga disampaikan oleh Fahrul/Sri Rt 4 yaitu:<sup>86</sup>

“Saya mendapat bantuan beras miskin, dan hal itu sudah lama sejak saya berdomisili disini. Warga yang mendapat bantuan beras miskin sebanyak 5 KK. Cara pendataanya yaitu dengan diminta untuk mengantarkan KTP dan KK kepada ketua RT. Tidak ada petugas yang datang untuk mendata. Tidak ada pembaharuan data. Menurut saya pembagian raskin belum sesuai dengan aturan karena masih banyak kekurangan seperti beras yang datangnya tidak pasti kadang 3 bulan sekali kadang 6 bulan sekali, dan kualitas beras yang kurang bagus serta setiap warga harus menebus Rp.4000/kg.”

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan Rumah
Fahrul	Wiraswasta	Rp.500.000	Semi Permanen
Sri	Wiraswasta	Rp. 350.000	

Hal lain juga disampaikan oleh Ocit/Sari Rt 5 yaitu:<sup>87</sup>

“Saya mendapat bantuan beras miskin, dan hal itu sudah lama sejak saya berdomisili disini. Warga yang mendapat bantuan beras miskin sekitar 2-7 KK dalam satu RT. Cara pendataanya yaitu dengan diminta untuk mengantarkan KTP dan KK kepada ketua RT. Tidak ada petugas yang datang untuk mendata. Tidak ada pembaharuan data. Menurut saya

---

<sup>86</sup> Fahrul/Sri, Wawancara, 1 Desember 2018.

<sup>87</sup> Ocit/Sari, Wawancara, 1 Desember 2018.

pembagian raskin belum sesuai dengan aturan karena masih banyak kekurangan seperti beras yang datangnya tidak pasti kadang 3 bulan sekali kadang 6 bulan sekali, dan kualitas beras yang kurang bagus serta setiap warga harus menebus Rp.4000/kg.”

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan Rumah
Ocit	Wiraswasta	Rp.200.000	Semi Permanen
Sari	Wiraswasta	Rp. 50.000	

Hal lain juga disampaikan oleh Aril/Uus Rt 5 yaitu:<sup>88</sup>

“Saya mendapat bantuan beras miskin, dan hal itu sudah lama sejak saya berdomisili disini. Warga yang mendapat bantuan beras miskin kurang lebih sebanyak 2-7 KK. Cara pendataanya yaitu dengan diminta untuk mengantarkan KTP dan KK kepada ketua RT. Tidak ada petugas yang datang untuk mendata. Tidak ada pembaharuan data. Menurut saya pembagian raskin belum sesuai dengan aturan karena masih banyak kekurangan seperti beras yang datangnya tidak pasti kadang 3 bulan sekali kadang 6 bulan sekali, dan kualitas beras yang kurang bagus serta setiap warga harus menebus Rp.4000/kg.”

Nama	Pekerjaan	Pendapatan	Keadaan Rumah
Aril	Wiraswasta	Rp.1000.000	Semi Permanen
Uus	Wiraswasta	Rp. 750.000	

Dari jawaban informan di atas lurah, ketua RT 1 sampai 5 serta masyarakat dapat peneliti uraikan bahwa pendataan dan pendistribusian bantuan beras miskin belum terjalankan dengan baik karena masih banyak pelaksanaan yang belum berjalan, seperti yang diungkapkan oleh lurah dan ketua RT cara mereka melakukan pendataan dengan mendatangi rumah warga masing-masing dan melihat secara langsung kondisinya, namun hal

---

<sup>88</sup> Aril/Uus, Wawancara, 1 Desember 2018.

itu berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh warga, petugas tidak melakukan pendataan kerumah melainkan wargalah yang mengantarkan data masing-masing ke ketua RT. Hal lain juga berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh pemerintah setempat tentang harga penebusan beras dan ketepatan pembagian beras kepada warga. Dalam hal ini pendataan serta pendistribusian beras yang dilakukan di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma belum terjalankan dengan baik masih banyak penyelewengan-penyelewengan berati dalam hal ini pedoman 5T belum terjalankan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan telaah dokumentasi, maka selanjutnya akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analisis. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti akan menginterpretasikan hasil wawancara penelitian dengan beberapa informan dan membandingkan serta membandingkan dengan menganalisisnya, berdasarkan kerangka teori yang ada.

### **1. Sistem pelaksanaan pendataan beras miskin (Raskin) dan pendistribusian dianalisis menggunakan teori kriteria program raski.**

#### **a) Tepat Sasaran**

Dalam kriteria program raskin bahwa raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang terdaftar dalam penerimaan bantuan raskin. Rumah tangga yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut tidak

berhak menerima bantuan raskin. Bukan hanya itu saja namun pendataan juga dilakukan secara berkala artinya data diperbaharui tiap tahunnya dan didampingi aparat kepala desa serta kepala lingkungan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pendataan dan pendistribusian yang dilakukan di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma, bahwa ada warga yang tidak seharusnya berhak menerima bantuan raskin namun mereka justru mendapatkan bantuan tersebut, artinya petugas dalam melakukan pendistribusan tidak tepat pada orang yang berhak menerima bantuan melainkan bantuan diberikan kepada warga yang mampu, hal tersebut terjadi karena di dalam pendataan tidak ada pembaharuan setiap tahunnya, serta tidak ada pendampingan langsung dari kepala desa ataupun petugas desa yang datang untuk mendata pembagian beras miskin.

b) Tepat Jumlah

Dalam teori tepat jumlah ini warga yang menerima bantuan raskin wajib menerima beras sebanyak 15kg dalam satu bulan selama 12 bulan dan jumlah tersebut sudah menjadi ketetapan pemerintah. Namun pada wakt dilapangan warga hanya menerima bantuan raskin sebanyak 13kg saja, hal ini dikarenakan ada pemotongan beras dengan alasan yang tidak masuk logika, serta dalam pembagian beras yang seharusnya dibagikan pada tiap bulan tapi faktanya beras hanya dibagikan pada 3 bulan sekali.

c) Tepat Harga

Dalam teori kriteria raskin bahawa warga diwajibkan membayar harga beras miskin hanya Rp.1600/kg dan apa bila ada kenaikan harga berati hal itu diluar ketentuan dari pemerintah atau harga tersebut telah disepakati bersama dengan warga yang menerima bantuan raskin. Namun berdasarkan data yang peneliti peroleh dari informan bahwa pembayaran beras rasin per Rt tidak sama ada yang Rp. 3500/kg namun ada juga yang Rp.40000/kg nya, hal ini tidak ada kesepakatan sebelumnya namun hanya saja pihak yang bertugas memberi berita tersebut ketika pengambilan beras tanpa memberi tau alasanya.

d) Tepat Waktu

Dalam teori kriteria program raskin waktu pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTM penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi yaitu dibagikan setiap bulannya atau 12 bulan dalam satu tahun. Penyaluran Raskin sudah direncanakan oleh Bulog untuk setiap penyaluran beras tiap bulannya. Ketepatan waktu dalam penyaluran akan sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun sayangnya hal ini tidak berjalan dengan lancar sesuai yang telah diprogramkan oleh Bulog, karena beras raskin hanya dibagikan dalam 3 bulan sekali dan itupun jumlahnya berkurang dan harganya naik.

e) Tepat Adminitrasi

Dalam hal ini tepat administrasi diartikan sebagai terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. Dalam administrasi pelaporan tersebut tim koordinasi Raskin kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi harus melaporkan kepada tim koordinasi di tingkat atasnya secara periodik setiap tiga bulan. Selain itu, tim koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyusun laporan tahunan pada akhir tahun. Namun hal ini tidak dijalankan oleh pihak petugas, petugas tidak melakukan pendataan dengan sungguh-sungguh karena pendistribusiannya tidak tepat sasaran, hal ini dapat dilihat dari sebagian warga yang menerima bantuan beras miskin adalah golongan orang menengah. Artinya selama ini pemerintah tidak melakukan pembaharuan dalam program raskin tersebut.

## **2. Pendataan dan Pendistribusian beras miskin (Raskin) di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma menurut perseptif ekonomi Islam.**

Dalam hal ini peneliti juga akan menganalisis pendataan dan pendistribusian raskin menurut perspektif ekonomi Islam menggunakan prinsip ekonomi Islam yaitu:<sup>89</sup>

### a). Kepemilikan

Dalam prinsip ekonomi Islam bahwa manusia harus tau mana yang baik dan buruk bagi dirinya maupun orang lain, karena ekonomi Islam bersifat Rabaniyah atau ketuhanan karena titik berangkatnya dari

---

<sup>89</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM, 2005) h. 43-49.

Allah segala sesuatunya dan tujuannya mendapat ridha Allah dan tidak bertentangan dengan larangannya. berbuat baik terhadap orang lain dan menjalankan tugas atau apapun dengan amanah agar apa yang dikerjakan menjadi bermanfaat bagi semua umat. Islam pun mengajarkan dan menganjurkan kepada manusia untuk selalu berbuat baik dan menyebar kebaikan dimuka bumi dengan cara yang baik. Seperti halnya manusia harus memiliki sifat amanah agar manusia dapat membedakan mana yang menjadi hak ataupun miliknya sendiri, mereka dapat membedakan antara milik umum dan pribadi agar nanti mereka dapat amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan orang lain terhadap dirinya dan mereka dapat dipercaya karena telah menjadi manusia yang amanah dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini hak dan kepemilikan juga ada pada pemerintahan salah satunya yaitu berada di Kelurahan Lubuk Lintang Kec. Seluma, dimana telah terdapat tegus dalam pembagian beras miskin (Raskin), yang harus dibagikan oleh warga setempat. Dan dalam pembagian pemerintah setempat harus menyeleksi beberapa warga yang memiliki kriteria tertentu dengan pemerintah melakukan pendataan serta pendistribusian karena tidak semua warga mendapatkan bantuan beras miskin, salah satunya warga yang mendapatkan batuan beras miskin adalah warga yang tidak mempunyai pendapatan diatas Rp.1000.000, belum memiliki kendaraan sepeda motor, dan rumahnya masih belum permanen atau masih terbuat dari kayu atau papan dan belum berlantai semen atau keramik. Namun

bedasarkan hasil wawancara kepada warga setempat bahwa banyak kesalahan dalam mendata dan mendistribusikan bantuan tersebut hal ini terbukti dari banyaknya warga yang kecewa dan marah terhadap pemerintah yang tidak adil dalam membagi. Padahal dalam teori kepemilikan bahwa manusia harus amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harus membagikan sesuatu yang bukan miliknya dengan amanah dan adil.

b). Keseimbangan

Dalam teori keseimbangan bahwa manusia harus bisa menyeimbangkan kehidupan ini dengan baik, apabila kita bisa seimbang dalam hidup maka kebaikan akan turut serta, seperti halnya kita dalam menjalankan tugas, dalam membagi apapun kita hrs seimang atau adil, jika kita adil maka tidak akan ada kesalah pahaman antara sesama. Dan dalam sifat ekonomi Islam yang rabbani yaitu lebih menggunakan hati nurani, yang ditumbuhkan oleh iman didalam hati seorang muslim, dan menjadi pengawas bagi dirinya, seperti difirmankan kita tidak diperbolehkan memakan dan mengambil harta orang lain. Dalam Islampun kita dianjurkan untuk selalu berbuat adil tidak pilih kasih, tidak memandang bulu dan tetap amanah memberikan hak milik pada yang berhak mendapatkannya. Serta jika membagikan sesuatu harus seimbang seperti dalam membagikan dana. Dalam hal ini di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma sistem pendataan dan pendistribusian belum berjalan dengan baik karena banyak warga yang kecewa terhadap sikap

pemerintah dalam membagi beras ataupun memberikan tarif yang cukup besar dan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam membayar dana tebusan beras yang harus dibayar Rp.4000/kg. Sedangkan dalam teori keseimbangan manusia harus bisa berbuat adil dan tidak pilih kasih serta bisa menyeimbangkan dana yang dikeluarkan.

c). Keadilan

Dalam teori keadilan bahwa manusia harus adil dan jujur, adil terhadap semua orang tidak membedakan satu sama lain, tidak pandang bulu, tidak pandang sikaya dan si miskin semua sama. Dalam hal ini tidak hanya manusia biasa saja yang harus menjalankan keadilan tapi pemerintah juga lebih harus memiliki jiwa adil, karena mereka akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat jika mereka tidak adil. karena segala sesuatu yang ada didunia adalah milik Allah SWT dan akan kembali padanya. Dalam Islam pun menganjurkan kepada umat untuk berbuat adil terhadap semuanya, agar mendapat kebaikan dan balasan dari Allah SWT. Dalam hal ini di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma yang terdapat pemerintahan yang harus berbuat adil terhadap masyarakatnya agar masyarakat mendapat kesejahteraan yang terjamin, namun hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang ada, karena pemerintah tidak adil terhadap warganya hal ini terbukti saat saya mewawancarai warga setempat tentang pembagian beras Raskin, mayoritas warga mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan pendataan dan pendistribusian

dengan adil karena warga yang seharusnya mendapat bantuan ternyata tidak mendapatkannya, dan juga tarif yang ditentukan untuk menebus beras sebanyak Rp.4000/kg. Sedangkan dalam teori keadilan sudah jelas manusia dianjurkan untuk adil dan amanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendataan dan pendistribusian beras miskin (raskin) di Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma dalam perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pendataan dan pendistribusian beras miskin di Kel. Lubuk Lintang Kec. Seluma yaitu masih menggunakan pendataan manual dengan cara petugas raskin menandatangani rumah warga yang layak mendapatkan bantuan beras miskin dan ada juga warga yang diminta untuk mengumpulkan berkas ke ketua RT dan ke kantor Lurah.
2. Persepektif ekonomi Islam terhadap pendataan dan pendistribusian beras miskin di Kec. Lubuk Lintang Kec. Seluma belum sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena petugas raskin belum amanah.

#### **B. Saran**

Ada beberapa saran dari peneliti yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak terkait.

1. Pemerintah hendaknya selalu melihat dan meninjau kondisi masyarakatnya secara langsung untuk memberikan bantuan yang tepat bagi wargannya.
2. Bagi masyarakat perlu diberdayakan lagi melalui pengetahuan keterampilan agar mempunyai penghasilan lain, sehingga mampu memenuhi kebutuhan bagi keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- AL-Qardhawy, Yusuf. *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan.* Surabaya: Bima Islam. 2013S.
- Boedipno. *Ekonomi Mikro.* Yogyakarta: BPFE. 1989.
- Bulog. *Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perum Bulog Tahun.* Jakarta: Perum Bulog. 2014.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta:Sinar Grafika. 2013.
- Hak, Nurul. *Hukum Ekonomi Islam Dan Bisnis Syari'ah.* Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ismail Usman, Asep. *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Julkas, Juknis, *Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin,* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda. 2007.
- Nina Maryana, *Implemitasi Porgram Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang,* Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Semarang. 2010.
- Pedoman Umum. *Raskin.* Jakarta: Mekanisme Pelaksanaan. 2018.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 2010.
- Pitapurwati, Winria, *Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kec. Sumarorong,* Skripsi: Universitas Hasanuddin. 2014.
- Poerdamawinta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.2002.
- Kuncoro, Mudrajat. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah Dan Kebijakan.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.2000.

Lincoln, Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. 2004.

Saladin, Djasalim. *Menejemen Pemasaran Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengendalian*. Bandung: Linda Karya 2013.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Widiyastuti. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2005.